

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Anggraini, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bambang. 2001. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basuki Winarno, Nur. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Effendi, Joenani dan Jhony Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Normatif dan empiris*. Depok: Pustaka Media.
- Edwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Ilham Samanlangi, Andi. 2016. *Sistem Penambangan*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2001. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.
- Marbun, SF dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Intern Pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat*.
- Muhjad, M. Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ragawino, Bewa. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.

- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Siahaan, N. H. T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Soejito, Rawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudrajat, Nanang. 2013. *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Sujamto. 1987. *Aspek-Apek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sukandarrumidi. *Bahan – Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suradina. 1996. *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Martha Indonesia.
- Syamsi, Ibum. 1982. *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Utama, Yos Johan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Yanti, Herman. 2004. *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004*.

B. Jurnal dan Internet

- Atok, A Rasyid Al. 2016. *Negara hukum Indonesia*.
- Bhayu Widyastomo, Risyanto. 2013. *Pengaruh Penambangan Pasir Dan Batu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penambang Di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. 2(3).
- Butar ,Franky Butar. 2010. *Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan*. 25(2).
- Damaiyanti, Rini. 2019. *Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman*.
- Dini Widyasmarani Seherman, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, Sri Mulatsih. 2015. *Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air*.

Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. 5(2).

Ekky Okvan Nugroho, Untung Sri Hardjanto, Budi Gutami. 2016. *Pengaturan Pertambangan Galian C di Jawa Tengah Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. *Diponegoro Law Journal*. 5(3).

Hardiyanti,Siti. 2018. *Pengawasan Aktivitas Galian C di Gunung Pinang Kabupaten Serang*.

Hamzani, Achmad Irwan. 2004. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yustisia Edisi 90.

Iqbal Shalihin. 2018. *“Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”*. Tesis. Fakultas Hukum. Magister Ilmu Hukum. Universitas Andalas. Padang

Kartono. 2017. *Analisis Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014*. *Bina Hukum Lingkungan*. 2(1).

Miner, Jacky. *Teori Pertambangan I*.

Mezak, Meray Hendrik. 2006. *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penulisan Hukum*. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. 3(3).

Puluhulawa, Fenty. U. 2011. *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto*, 11(2).

Putri, Shinta Diana. 2009. *Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*.

Retnadumillah, Saliha. 2017, *Perizinan Pertambangan batuan dalam Mewujudkan Tata Kelola Yang Berwawasan Lingkungan*. *Jurnal Katalogis*, 5(2).

Shira Tania. 2017. *Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Warta Edisi*: 51.

Soemarsono, Maleha. 2017. *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*.

Yudhistira, Andrea. 2016. *Pengelolaan Pertambangan Mineral Batuan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.*

Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hadiyanto. 2011. *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi.* Jurnal Ilmu Lingkungan. 9(2).

Zainab Ompu Jainah. 2002. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.* Jurnal of Rural and Development. III (2).

Zakky. 2019. *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Beserta Arti dan Definisinya.*

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596)

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 18)